

# Contoh Penerapan Kerangka RIA

# Perda Pengelolaan Wilayah Pasar di Kota Parepare

<b>Perumusan masalah</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perizinan pedagang tidak tertib</li><li>• Penggunaan sarana dan prasarana tidak tertib</li><li>• Wilayah keramaian pasar semrawut</li><li>• Kelembagaan pengelola pasar kurang berfungsi</li></ul>
<b>Perumusan Tujuan</b>	<p>Terwujudnya pengelolaan pasar dan wilayah keramaian pasar yang tertib:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tertibnya perizinan pedagang</li><li>• Tertibnya penggunaan sarana dan prasarana</li><li>• Tertatanya wilayah keramaian pasar</li><li>• berfungsinya kelembagaan pengelola pasar</li></ul>
<b>Perumusan Alternatif Tindakan (Opsi)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Do Nothing (Tidak melakukan apa-apa/menunda ditetapkannya regulasi pengelolaan pasar dan wilayah pasar)</li><li>2) Melakukan revisi Perda, yang didasarkan pada gabungan alternatif tindakan dengan tahapan berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Pemda menetapkan klasifikasi lods, tempat berjualan di pelataran dan di wilayah keramaian pasar</li><li>b) Menetapkan retribusi berdasarkan jenis sarana, klasifikasi lods dan tempat berjualan</li><li>c) Melakukan koordinasi dan meningkatkan pengawasan untuk penegakkan hukum</li><li>d) Melakukan pembinaan terhadap lembaga pengelola pasar dan melakukan sosialisasi serta kampanye keamanan, kebersihan dan ketertiban pasar</li></ol></li></ol>

## Perda Pengelolaan Wilayah Pasar di Kota Parepare (lanjutan)

### Analisis Manfaat-Biaya: Opsi 2 (Melakukan revisi Perda)

Jenis Manfaat	Penerima Manfaat	indikator	Tingkat Manfaat
Tambahan pendapatan pedagang	Pedagang	Pendapatan pedagang resmi ( <i>legal</i> )	Besar
PAD dari retribusi pasar meningkat	Pemda	Penerimaan retribusi pasar	Sedang
Kenyamanan berbelanja	Konsumen	Tidak terukur (manfaat kualitatif)	Besar
PAD dari retribusi parkir di wilayah keramaian meningkat	Pemda	Penerimaan retribusi parkir	Kecil
Persaingan usaha sehat	Pedagang	Tidak terukur (manfaat kualitatif)	Besar

## Perda Pengelolaan Wilayah Pasar di Kota Parepare (lanjutan)

### Analisis Manfaat-Biaya: Opsi 2 (Melakukan revisi Perda)

Jenis Biaya	Penerima Biaya	indikator	Tingkat Biaya
Penurunan pendapatan pedagang di pelataran dan wilayah keramaian pasar	Pedagang	Pendapatan pedagang	Sedang
Peningkatan biaya operasional pengelola pasar	Pemda	Biaya operasional	Sedang
Biaya retribusi meningkat	Pedagang	Biaya retribusi	Sedang
Oknum yang menyewakan izin berjualan dan tukang parkir tidak resmi kehilangan pendapatan	Oknum	Pendapatan oknum yang hilang	Tidak dihitung

## Perda Pengelolaan Wilayah Pasar di Kota Parepare (lanjutan)

<b>Konsultasi Stakeholder</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Konsultasi dilakukan pada semua tahapan dalam proses RIA kepada berbagai pihak terkait, antara lain: penjual di pasar, Lurah, instansi terkait, akademisi, dan tokoh masyarakat.</li><li>• Konsultasi publik dilakukan dalam bentuk diskusi kelompok terfokus (FGD), wawancara dengan penjual untuk verifikasi asumsi yang digunakan, publikasi melalui media cetak (leaflet) dan dialog interaktif di radio.</li><li>• Konsultasi publik dilengkapi dengan notulen pertemuan dan hasil wawancara.</li></ul>
<b>Strategi Implementasi</b>	<p>Untuk mengefektifkan pelaksanaan Perda Pengelolaan Wilayah Pasar ini, strategi implementasi yang harus dipertimbangkan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) Peningkatan kesejahteraan pengelola pasar</li><li>b) Struktur organisasi dan tupoksi pengelola pasar harus jelas</li><li>c) Pasar dikelola sebagai unit usaha pemerintah daerah</li><li>d) Semua pasar di Parepare dikelola oleh satu unit pengelola</li><li>e) Penegakkan fungsi Perda sebagai instrumen pengaturan, artinya jumlah penjual harus dibatasi melalui pemberian izin, dan bagi yang menjual tanpa izin dikenakan sanksi, misalnya dikenakan retribusi 10 kali lipat dari tarif yang berlaku</li><li>f) Mempertimbangkan berbagai alternatif sosialisasi Perda yang efektif</li><li>g) Menentukan strategi monitoring pelaksanaan Perda yang tepat</li></ol>

# Penerapan RIA di negara-negara lain

# Perbandingan pengalaman internasional

Negara	RIA diwajibkan oleh	Analisis RIA dilakukan oleh	Apakah dipublikasikan?	Quality Control
Amerika Serikat	Instruksi presiden, beberapa UU	Regulator	Semua RIA (draft dan final) dipublikasi	Review oleh Office of Management and Budget (OMB). Tersedia <i>guidance</i>
Inggris	Kebijakan kabinet	Regulator	Ya, dipublikasikan sebagai bagian dari <i>review</i> akhir oleh komite parlemen	Menteri terkait; review oleh Deperindang; Tersedia <i>guidance</i>
Australia	Kebijakan kabinet	Regulator	Ya, diedarkan untuk direview	<i>Review</i> independen oleh Komisi Industri; Tersedia <i>guidance</i>
Kanada	Keputusan Treasury Board, sesuai wewenang UU Administrasi Keuangan	Regulator	Ya, semua RIA (draft & final) diterbitkan dalam lembaran negara	Saran dari Sekretariat Treasury Board; Tersedia <i>guidance</i>
Denmark	Kabinet	Regulator	Ya	Review oleh Menteri Keuangan

## Perbandingan pengalaman internasional (lanjutan)

Negara	RIA diwajibkan oleh	Analisis RIA dilakukan oleh	Apakah dipublikasikan?	Quality Control
Belanda	Instruksi Perdana Menteri	Regulator	Ya, melalui publikasi dan penyerahan pada parlemen	Saran dari menteri lainnya, terutama menteri kehakiman dan menteri urusan ekonomi; <i>review</i> oleh dewan independent
Mexico	Instruksi Presiden	Regulator	Tidak	Otorisasi oleh Presiden; <i>Review</i> oleh Menteri Komersial; <i>Review</i> oleh Economic Deregulation Council
Jepang	Keputusan Kabinet	Regulator	Tidak	Tanggungjawab pada regulator; pedoman dikeluarkan oleh Menteri administrasi publik, dalam negeri, pos dan telekomunikasi

# RIA Best Practice - International

## Ukraina

- Mereview regulasi yang ada dan menyaring rancangan regulasi
- Tahun 1998-2000 = 120 draft regulasi direview (60% ditolak)
- Regulasi yang sedang berlaku direview secara bertahap

## Korea

- 50% dari 11,000 regulasi dihapus dalam satu tahun
- Dibentuk *Regulatory Reform Committee*
- 241 dari 884 draft regulasi ditolak dalam 1999

## Kenya: *Enabling Business Environment Approach*

- Membentuk *Deputy Deregulasi* dalam Kementrian Perencanaan & Pembangunan Nasional (*Menciptakan Champion*).
- Menerapkan *Single Business Permit Policy* yang diikuti oleh 32 kabupaten/kota (Mengurangi perijinan usaha dari 25 menjadi 1, mengurangi transaction cost sekitar 70%)
- Pembentukan *Kenya Private Sector Alliance* sebagai lembaga advokasi untuk mendorong perumusan kebijakan yang dimotori oleh sektor swasta.

# Penerapan RIA di Indonesia

# Inisiatif RIA di Indonesia

Institusi	Tahun	Kegiatan-Kegiatan Utama
DCTF (ADB)	2000  2003 -2004	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembuatan Manual, Pembentukan Deregulation &amp; Competition Task Force, Seminar Diseminasi dan Pelatihan, Mereview 3 regulasi nasional</li> <li>▪ Revisi Manual RIA dan menyusun Kerangka Pelembagaan</li> </ul>
PEG (USAID)	2001	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Seminar Diseminasi dan Sosialisasi di tingkat propinsi</li> </ul>
Deperindag- BPPIP Deperdag	2002  2004  2005/2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sosialisasi, Pelatihan</li> <li>▪ Pelatihan Fasilitator, Sosialisasi ke propinsi,</li> <li>▪ Pelatihan RIA, Review 2 regulasi nasional</li> </ul>
Bappenas (TAF)	2003  2005  2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelatihan RIA</li> <li>▪ FGD tentang pelembagaan RIA</li> <li>▪ Pelatihan RIA untuk Pejabat Eselon 1 dan 2</li> </ul>
Bapekki - Depkeu	2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelatihan RIA</li> </ul>
SETJEN DPR RI	2007	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelatihan RIA</li> <li>▪ Pembuatan Manual RIA untuk penyusunan UU</li> </ul>
KPK, Depdag, Depkeu	2008	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelatihan RIA</li> </ul>
Depdag, Depkeu, FE UI, Bappenas	2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelatihan RIA</li> <li>▪ Kajian 4 regulasi nasional di Depdag dan Depkeu</li> <li>▪ TOT dan revisi manual RIA</li> </ul>

# Penerapan RIA di daerah

Provinsi	Kabupaten/Kota
Sumatera Barat	Solok
Sumatera Selatan	Palembang
Jawa Barat	Purwakarta, Cirebon, Indramayu
Jawa Tengah	Pekalongan, Sragen, Semarang, Salatiga, Demak, Grobogan, Kendal, Sidoarjo, Wonogiri, Solo, Karanganyar, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Pati
Yogyakarta	Yogyakarta, Gunungkidul, Kulon Progo, Bantul
Jawa Timur	Blitar, Madiun, Pasuruan
Sulawesi Utara	Minahasa, Minahasa Selatan
Gorontalo	Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo
Sulawesi Selatan	Makasar, Parepare, Bulukumba, Pinrang
Aceh	Aceh Besar, Aceh Barat Daya, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tenggara
Nusa Tenggara Timur	Kupang, Timor Tengah Utara, Sikka

# Inisiatif RIA di Kabupaten/Kota (1)

## Kabupaten Gorontalo

- Membentuk tim penasihat perumusan kebijakan (Bappeda)
- Training RIA terhadap 10 + 40 pegawai Pemda
- Merevisi dan mencabut berbagai perda melalui RIA

## Kota Pare-Pare

- Merevisi belasan perda dengan RIA
- Melembagakan metode RIA dalam RPJM 2006-2008
- Mewajibkan proses RIA untuk Ranperda (dituangkan dalam bentuk Keputusan Walikota - menuju Ranperda)

## Kabupaten Solok

- Mewajibkan proses RIA untuk Ranperda (dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati)

## Inisiatif RIA di Kabupaten/Kota (2)

### Kabupaten Sragen

- Membentuk TIM RIA
- Merevisi dan mencabut berbagai perda melalui RIA
- Membebaskan biaya perizinan bagi usaha baru

### Kabupaten Aceh Tenggara, Bireuen & Abdya

- Membuat Peraturan Bupati yang isinya mewajibkan untuk menggunakan Metode RIA dalam penyusunan Ranperda
- Ranperda dengan metode RIA dipakai oleh Bupati untuk diajukan ke DPRK untuk dibahas dan disahkan menjadi Perda/Qanun

**Terima Kasih**